

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN REKOMENDASI MAJELIS
PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT OLEH PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA**

(Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337/K/TUN/2021)

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas*



Oleh :

FEROTAMA JAKA SAKTI

2120122017

Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., MKn.

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H, M.H.

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**





HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No.Reg: 06/Mkn/II/2025

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN REKOMENDASI MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT OLEH

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor:

337/K/TUN/2021)

*LEGAL CONSEQUENCES OF THE CANCELLATION OF THE PPAT ADVISORY AND
SUPERVISORY COUNCIL'S RECOMMENDATION BY THE STATE ADMINISTRATIVE COURT
(Case study: Supreme Court Decision Number: 337/K/TUN/2021)*

Disusun Oleh:

Author:

Ferotama Jaka Sakti

2120122017

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025 Dan
Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

*This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On June 26th, 2025 And
Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:*

Pembimbing I
Supervisor I

Dr. Azmi Fendri, S.H., MKn.
NIP. 197505102005011003

Pembimbing II
Supervisor II

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H
NIP. 198402182008012002

Penguji I
Examiner I

Dr. Yuslim, S.H., M.H
NIP. 1957707061983031008

Penguji II
Examiner II

Dr. Delfivanti S.H., M.H
NIP. 197502162001122001

Penguji III
Examiner III

Alexander S.H., M.Kn.

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi
Head Of Study Program

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H
NIP. 198402182008012002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

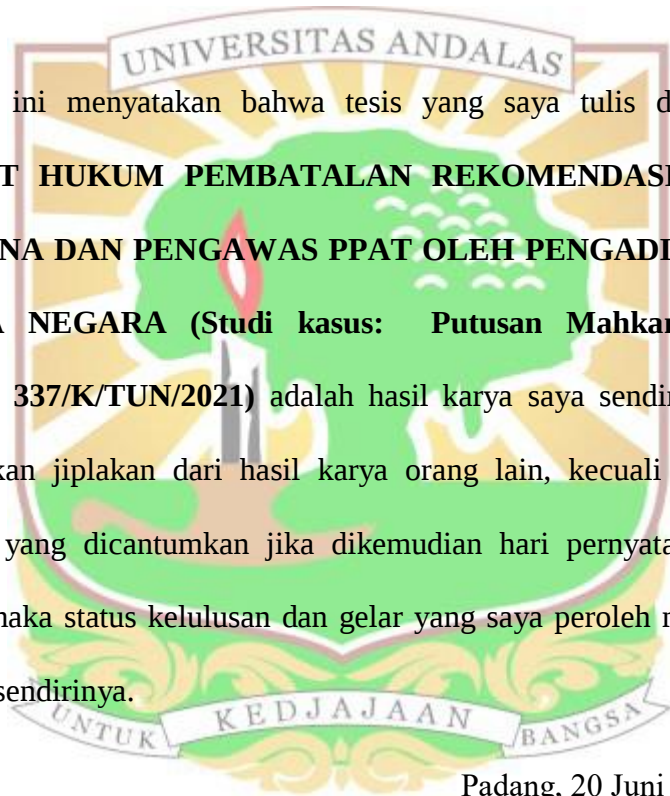
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEROTAMA JAKA SAKTI**

Nomor Induk Mahasiswa : **2120122017**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan Judul **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN REKOMENDASI MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS PPAT OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337/K/TUN/2021)** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumber yang dicantumkan jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.



Padang, 20 Juni 2025

FEROTAMA JAKA SAKTI

2120122017

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN REKOMENDASI MAJELIS PEMBINA
DAN PENGAWAS PPAT OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337/K/TUN/2021)**

*Ferotama Jaka Sakti, 2120122017, Program Magister Kenotariatan,
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2025*

ABSTRAK

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, KTUN merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat individual, konkret, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. MPPD sebagai badan pengawas dan pembina PPAT yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agraria Tataruang/Badan Pertanahan dapat mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPAT yang melakukan pelanggaran dari peneguran hingga pemberhentian secara tidak hormat. Pada penulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimanakah sifat dan karakteristik rekomendasi yang dikeluarkan Majelis pembina dan pengawas PPAT secara hukum administrasi negara, kedua bagaimanakah pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337/K/TUN/2021 terkait pembatalan rekomendasi Majelis pembina dan pengawas PPAT daerah oleh PTUN, ketiga bagaimanakah akibat hukum pembatalan rekomendasi Majelis pembina dan pengawas oleh PTUN dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 337/K/TUN/2021, pada penelitian ini penulis menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif, Bahan utama penelitian ini adalah Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan Undang-Undang, literatur dan kajian hukum lain. Metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah sifat dan karakteristik rekomendasi MPPD PPAT secara hukum administratif. Sifat hukum dari rekomendasi ini perlu dikaji secara mendalam untuk menentukan kekuatan mengikatnya, baik secara administratif maupun dalam konteks penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, perlu menganalisis sifat hukum rekomendasi MPPD PPAT berdasarkan perspektif doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademis terkait. bersifat *non-binding* (tidak mengikat secara hukum) namun memiliki kekuatan persuasif dan normatif-edukatif. Karakteristiknya mencerminkan fleksibilitas dan orientasi pada standar profesi, meskipun tidak memiliki sanksi hukum langsung.

Kata Kunci : Majelis Pembina dan Pengawas, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengadilan Tata Usaha Negara.

**LEGAL CONSEQUENCES OF THE CANCELLATION OF THE PPAT
ADVISORY AND SUPERVISORY COUNCIL'S RECOMMENDATION BY
THE STATE ADMINISTRATIVE COURT**

*Ferotama Jaka Sakti, 2120122017, Master of Notary Program, Faculty of Law,
Andalas University, Year 2025*

ABSTRACT

State Administrative Decisions (KTUN) are regulated in various laws and regulations, based on Article 1 number 3 of the PTUN Law, KTUN is a written determination issued by the State Administrative Agency or Official containing State Administrative legal actions based on State Administrative Law based on applicable laws and regulations, which are individual, concrete, and final in nature which have legal consequences for a person or civil legal entity. MPPD as a supervisory and development body for PPAT appointed directly by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Land Agency can issue a letter of recommendation to PPAT who commits violations from warnings to dishonorable dismissal. In this paper, there are three formulations of the problem that will be discussed, first, what are the nature and characteristics of the recommendations issued by the PPAT Advisory and Supervisory Board according to state administrative law, second, what are the considerations of the Judge in the Supreme Court Decision Number: 337/K/TUN/2021 regarding the cancellation of the recommendations of the PPAT Advisory and Supervisory Board by the PTUN, third, what are the legal consequences of the cancellation of the recommendations of the Advisory and Supervisory Board by the PTUN in the Supreme Court Decision Number: 337/K/TUN/2021, in this study the author uses the approach method in this study is the normative legal method which is descriptive, the main material of this study is Secondary Data obtained from various previously existing data based on Laws, literature and other legal studies. The method of data collection with document studies and data analysis using qualitative analysis methods. The results of the study are the nature and characteristics of the PPAT MPPD recommendations according to administrative law. The legal nature of this recommendation needs to be studied in depth to determine its binding force, both administratively and in the context of dispute resolution. Therefore, it is necessary to analyze the legal nature of the PPAT MPPD recommendations based on the perspective of legal doctrine, legislation, and related academic literature. is non-binding (not legally binding) but has persuasive and normative-educational power. Its characteristics reflect flexibility and orientation to professional standards, although it does not have direct legal sanctions.

Keywords : Advisory and Supervisory Board, Land Deed Making Officer, State Administrative Court

